



Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Rangka Menuju Indonesia Bebas Stunting Tahun 2021-2025

Kirana Putri Aulia

Universitas Padjadjaran, Indonesia; kirana21001@mail.unpad.ac.id

Nashwa Safa Hidayat

Universitas Padjadjaran, Indonesia; nashwa21002@mail.unpad.ac.id

Radja Kusuma Maulidhan Ahmad

Universitas Padjadjaran, Indonesia; radja21001@mail.unpad.ac.id

Dudy Heryadi

Universitas Padjadjaran, Indonesia; dudy.heryadi@unpad.ac.id

Deasy Silvya Sari

Universitas Padjadjaran, Indonesia; deasy.silvya@unpad.ac.id

| Dikirim: 06-01-2025

| Diterima: 03-06-2025

| Dipublikasikan: 20-08-2025 |

Keywords

CPAP,
Indonesia,
International
Cooperation,
Stunting
Reduction,
UNICEF

ABSTRACT

Stunting remains a significant public health issue in Indonesia, with long-term impacts on child growth and development. The Indonesian government partnered with UNICEF through the Country Program Action Plan (CPAP) 2021–2025 to reduce the stunting cases to 14% by 2024. This study aims to analyze the nature of this cooperation using a qualitative method and thematic analysis approach. This article applies Harold K. Jacobson's theory of international organization functions to examine UNICEF's role. The findings show that UNICEF performs informative, normative, monitoring, and operational functions, though it does not directly engage in rule-making. Through technical assistance, education campaigns, policy evaluation, and financial support amounting to US\$150 million, the cooperation has significantly contributed to reducing stunting. This multisectoral collaboration highlights the major role of international organizations in promoting child health development.

Kata Kunci

CPAP,
Indonesia, Kerja
Sama
Internasional,
Penurunan
Stunting,
UNICEF

ABSTRAK

Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Untuk dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF melalui program Country Program Action Plan (CPAP) 2021–2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerja sama tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis tematik. Teori fungsi organisasi internasional dari Harold K. Jacobson digunakan untuk mengkaji peran UNICEF dalam kerja sama ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF menjalankan fungsi informatif, normatif, pengawasan, dan operasional, namun tidak terlibat langsung dalam pembuatan peraturan. Melalui dukungan teknis, edukasi, evaluasi kebijakan, dan penyaluran dana sebesar US\$150 juta, kerja sama ini terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penurunan stunting. Kolaborasi multisektoral ini menjadi contoh penting peran organisasi internasional dalam pembangunan kesehatan anak.

PENDAHULUAN

Stunting adalah masalah yang signifikan dalam kesehatan anak dan didefinisikan sebagai penyakit yang menyebabkan tinggi badan rendah untuk anak dibanding standar untuk seusianya (WHO, 2020). Hal tersebut merupakan akibat dari malnutrisi kronis, dimana tubuh anak tidak menerima nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Stunting paling umum terjadi di negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah, di mana anak-anak sering menghadapi berbagai bentuk kekurangan gizi karena kemiskinan, akses terbatas ke makanan bergizi, serta sanitasi dan kebersihan yang buruk. Anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi terhadap mortalitas dan morbiditas, termasuk gangguan fungsi imun, peningkatan kerentanan terhadap penyakit menular, dan defisit kognitif. Selain itu, stunting dapat melanggengkan siklus kemiskinan dengan membatasi kemampuan anak-anak untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi pada komunitas mereka.

WHO memperkirakan bahwa 21,9% anak balita di seluruh dunia mengalami stunting. Sebagian besar balita stunting ini berasal dari Asia. Pada tahun 2020, lebih dari setengah dari semua anak balita yang terkena stunting berasal dari Asia (WHO, 2020). Di Indonesia sendiri, stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dengan sekitar 28% anak di bawah usia lima tahun terkena kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya signifikan untuk menurunkan angka stunting di negara ini. Pada tahun 2017, pemerintah menganangkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Strategi tersebut mencakup berbagai intervensi, seperti meningkatkan akses ke makanan bergizi, mempromosikan pemberian ASI, dan meningkatkan sanitasi dan kebersihan. Stunting merupakan permasalahan signifikan dalam kesehatan anak yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi berbagai penyebabnya. Sehingga, dalam rangka mengatasi angka stunting di Indonesia, pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan aktor-aktor lain, khususnya aktor internasional yang merupakan ahli dalam bidang kesehatan dan anak-anak agar program-program yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam menangani stunting di wilayahnya masing-masing, sebagaimana dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu. Beberapa studi menyoroti upaya penanganan stunting melalui program lokal (Mairo, Queen, Jenjawaty, Sherly, 2022), pengembangan intervensi berbasis komunitas (Musa et al., 2022), serta kerja sama lintas sektor pada tingkat nasional (Setiarsih et al., 2023). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kerja sama internasional dalam penanganan stunting, khususnya antara Indonesia dan aktor-aktor global, masih terbatas. Padahal aktor-aktor seperti negara, organisasi regional (misalnya ASEAN), organisasi internasional (seperti UNICEF), hingga perusahaan farmasi multinasional, memainkan peran yang signifikan.

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan salah satu aktor internasional yang secara aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan angka stunting. Kerja sama ini dikenal dengan nama Country Program Action Plan (CPAP), yakni sebuah rencana kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk periode 2021–2025. CPAP ini memiliki nilai sebesar US\$ 150 juta dan bertujuan untuk mencapai tujuh sasaran utama dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam penanganan stunting, dengan menitikberatkan pada peran dan pelaksanaan fungsi-fungsi UNICEF sebagai organisasi internasional. Ruang lingkup analisis dalam penelitian ini dibatasi pada kurun waktu 2021–2024, karena fokusnya adalah pada kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan merupakan data aktual, bukan proyeksi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Organisasi Internasional

Salah satu aktor yang krusial dalam hubungan internasional adalah organisasi internasional. Organisasi internasional sendiri didefinisikan oleh Clive Archer (2001) sebagai sebuah badan formal yang memiliki struktur yang jelas dan bersifat berkelanjutan, dimana organisasi internasional ini dibentuk oleh dua atau lebih negara yang memiliki tujuan yang sama. Secara historis organisasi internasional telah lama berkembang. Namun jika disesuaikan dengan indikator yang tetapkan oleh para ahli, organisasi internasional mulai berkembang pada abad ke-19 setelah pertemuan Versailles yang kemudian menyepakati terbentuknya LBB sebagai organisasi internasional pertama.

Inis Claude (1964: 17) menetapkan empat indikator yang mendasari terbentuknya organisasi internasional, pertama, organisasi tersebut haruslah dibentuk oleh sejumlah negara yang berdaulat, kedua adanya kontak atau hubungan diantara negara anggota, ketiga ada nya kesadaran bersama akan masalah yang muncul dari koeksistensi negara; dan yang terakhir adalah kesadaran dari para anggota untuk membentuk suatu lembaga atau badan yang memiliki sistem untuk meregulasi jalinan diantara para anggota (Archer. C, 2001). Berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Inis Claude, hanya indikator pertama yang memenuhi terbentuknya organisasi internasional pada tahun tahun sebelum abad ke-19. Dimana Negara-negara berdaulat khususnya di benua Eropa telah dibentuk sebagai hasil dari perjanjian Weshpalia. Sedangkan pada indikator kedua sendiri, kontak atau hubungan antar negara pada abad ke-18 diwarnai oleh perperangan. Tercatat dalam rentang tahun 1650 -1800-an telah terjadi 67 perang besar.

UNICEF memenuhi semua kategori yang telah ditetapkan. UNICEF sendiri berdiri atas persetujuan Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. UNICEF dibentuk untuk mengatasi permasalahan pangan dan kesehatan pada masa Perang Dunia II. Namun setelah Perang Dunia II berakhir, UNICEF merubah ranah fungsi mereka pada sektor perlindungan dan pemberdayaan anak-anak di setiap belahan dunia. Dimulai dari pasca berakhirnya Perang Dunia II, UNICEF hadir untuk mendampingi, memberdayakan dan menyuarakan pentingnya Hak Anak. Dalam menyuarakan hak anak, UNICEF telah turut serta membantu Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam menyusun Konvensi Hak Anak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa UNICEF merupakan salah satu organisasi yang telah memenuhi indikator organisasi internasional.

Beberapa akademisi dan praktisi hubungan internasional percaya bahwa organisasi internasional memiliki fungsi vital dalam sistem negara. Harold K. Jacobson (dalam Sugito, 2016 : 11) secara lebih rinci menjelaskan fungsi dari organisasi internasional. Secara ringkas, menurut Jacobson organisasi internasional memiliki 5 fungsi yang menjadi aktivitas pokok dari suatu organisasi internasional:

1) Fungsi informatif

Fungsi informatif merupakan tugas organisasi internasional dalam mengumpulkan, menganalisa pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi fungsi ini, organisasi internasional biasanya akan memanfaatkan staff mereka atau menyelenggarakan forum antar negara anggota.

2) Fungsi Normatif

Fungsi normatif sendiri mengacu pada penetapan norma-norma standar yang digunakan dalam lingkungan internasional dan domestik. Norma-norma ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat, namun efek dari norma-norma ini dapat mempengaruhi pola interaksi di lingkungan internasional.

3) Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini memiliki kemiripan dengan fungsi normatif, namun fungsi ini menekankan pada pembuatan aturan dan kebijakan yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, sebelum aturan-aturan tersebut diterapkan maka negara anggota terlebih dahulu akan melakukan ratifikasi.

4) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan sendiri merupakan kelanjutan dari fungsi sebelumnya. Fungsi ini mengacu pada tugas organisasi internasional untuk mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di setiap negara anggota mereka.

5) Fungsi Operasional

Fungsi operasional sendiri mengarah pada penyaluran sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional. Wujud nyata dari fungsi ini biasanya mengarah pada pemberian bantuan teknis dan keuangan, serta kekuatan militer.

Dalam konteks kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam penanggulangan stunting tahun 2021–2025, kelima fungsi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh UNICEF dalam mendukung target nasional Indonesia Bebas Stunting 2025. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berupaya memahami pelaksanaan kerja sama secara substantif melalui peran konkret UNICEF sebagai organisasi internasional.

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan salah satu proses yang esensial dalam interaksi negara-negara maupun aktor-aktor internasional. John Gerard Ruggie (2010) mendefinisikan kerja sama internasional sebagai sebuah keadaan di mana dua aktor, bisa berupa negara atau lebih mengubah perilaku mereka dengan cara yang akan menguntungkan keduanya dan keuntungan tersebut tidak akan didapat tanpa adanya interaksi. Kerja sama internasional biasanya dilakukan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan atau keuntungan baru bagi masing-masing pihak yang sebelumnya tidak dapat dicapai melalui pendekatan secara unilateral. Gagasan kerja sama internasional mulai menonjol pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh saling ketergantungan ekonomi dunia yang meluas dan kompleksitas masalah dunia seperti penyakit, kelaparan, dan perang.

Tonggak penting dalam sejarah kerja sama internasional merupakan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I yang meskipun dalam organisasi tersebut mengalami kegagalan karena tidak kuat nya pengaruh yang dimiliki. Pada periode setelah Perang Dunia II didirikan PBB dan organisasi internasional lainnya dengan tujuan untuk mendorong kerja sama internasional dan mengatasi masalah global yang mendesak. Kerja sama internasional dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah global yang semakin masif seperti perubahan iklim, terorisme, dan ketimpangan ekonomi telah mendapat perhatian baru sejak akhir Perang Dingin. Struktur kekuatan sistem internasional juga telah berubah sebagai akibat dari pertumbuhan negara-negara baru seperti China, yang menimbulkan dinamika baru dan memberikan peluang baru untuk kerja sama.

Kerja sama internasional terbagi ke dalam beberapa bentuk berbeda yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing negara dan aktor serta tujuan yang ingin dicapainya. Beberapa bentuk kerja sama adalah sebagai berikut (Touval & Zartman, 2010):

- 1) Kerja sama bilateral: ketika dua negara bekerja sama, terdapat tujuan bersama yang ingin dicapai.
- 2) Kerja sama regional: kerja sama ini melibatkan negara-negara di wilayah geografis tertentu yang bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama. Contoh kerja sama regional termasuk Uni Eropa dan ASEAN.
- 3) Kerja sama multilateral: kerja sama ini mengacu pada kerja sama beberapa negara menuju satu tujuan. Kerja sama ini dilakukan ketika masalah yang dihadapi bersifat global dan membutuhkan partisipasi beberapa negara.
- 4) Kerja sama publik-swasta: kerja sama ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Inisiatif untuk mengatasi perubahan iklim,

meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan merupakan beberapa contoh kolaborasi antara publik dengan swasta.

- 5) Kerja sama *Citizen-led*: kerja sama ini merupakan kolaborasi antara warga dan organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi lintas batas negara dalam mengatasi masalah bersama.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan UNICEF merupakan jenis kerja sama publik-swasta karena melibatkan pemerintah dan pelaku sektor swasta yaitu UNICEF dalam mencapai suatu tujuan bersama, dalam hal ini adalah peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus stunting.

METODE RISET

Rancangan riset yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan UNICEF dapat membantu pemecahan kasus stunting di Indonesia, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena peneliti merasa adanya kecocokan antara metode kualitatif dengan data-data yang ingin didapat untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode yang cocok untuk mengetahui objek penelitian seperti bentuk kerja sama, strategi kerja sama, serta berbagai program kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan UNICEF dalam rangka memecahkan masalah stunting di Indonesia.

Penelitian yang berjudul “Kerja Sama Indonesia dan UNICEF Menuju Indonesia Bebas Stunting Tahun 2018-2022” ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada berbagai publikasi, seperti buku, jurnal, berita, arsip, sosial media, dan laman resmi dari Pemerintah Indonesia maupun UNICEF. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis tematik untuk menganalisis data. Analisis tematik adalah metode analisis yang akurat untuk memahami pengalaman, pemikiran, atau perilaku di seluruh kumpulan data secara tepat dan efektif (Kiger & Varpio, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stunting sebagai Isu Kesehatan Global

Salah satu permasalahan yang turut menjadi pembahasan di penelitian ini adalah stunting. Stunting pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan pada anak-anak yang paling mendesak dan kronis di dunia saat ini. Stunting sendiri menurut WHO (1995) terjadinya perubahan bentuk tubuh yang dialami karena tempat tinggal. Terlepas dari banyaknya pendefinisian yang dilakukan oleh global tentang bagaimana mendefinisikan dan mengukur, stunting seringkali tidak dikenali dan disadari oleh masyarakat dimana perawakan pendek ketentuan utama karena pertumbuhan linier tidak dinilai secara rutin di rangkaian perawatan kesehatan primer dan sulit dilakukannya pemberian diagnosis jika hanya dilihat secara visual. Kerangka Konseptual Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang Stunting Anak menggambarkan bagaimana elemen rumah tangga, lingkungan, sosial ekonomi, dan budaya saling mempengaruhi untuk menyebabkan stunting.(Stewart et al. 2013).

Stunting terkadang terabaikan dalam masyarakat di mana tinggi badan kecil tersebut luas sehingga diterima sebagai hal yang normal. Kesulitan dalam mendeteksi anak-anak yang terhambat secara fisik, serta kurangnya pengukuran pertumbuhan linier yang sering dilakukan pada pelayanan kesehatan primer, menjadi penyebab mengapa tingkat keparahan wabah tersembunyi ini membutuhkan waktu lama untuk dikenali. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, stunting kini diakui sebagai masalah kesehatan global yang signifikan, dengan berbagai upaya penting seperti “Scaling Up Nutrition”, “Zero Hunger Challenge”, dan “Nutrition for Growth Summit” yang berfokus padanya. Enam target nutrisi global untuk tahun 2025 yang disetujui Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2012 juga berpusat pada stunting (WHO 2012).

Dalam rangka menurunkan angka stunting, diperlukan perhatian lebih terhadap penyakit ini karena pengetahuan yang lebih besar tentang signifikansinya sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Pertama, hal ini berdampak pada banyak individu muda di seluruh dunia. Kedua, efek negatif jangka pendek dan jangka panjang pada fungsi fisik dan kognitif seseorang, seperti kinerja kognitif dan akademik yang lebih buruk, gaji orang dewasa yang lebih rendah, dan penurunan produktivitas. Ketiga, ada konsensus luas mengenai definisinya dan standar yang jelas dan dapat diterapkan secara global untuk apa yang dimaksud dengan pertumbuhan manusia normal. Keempat, semua orang setuju bahwa masa kritis, yang berlangsung sejak pembuahan hingga dua tahun pertama kehidupan, adalah ketika faktor lingkungan yang dapat diubah, termasuk makanan, infeksi, dan dukungan psikologis, memiliki dampak terbesar pada pertumbuhan linier. Kelima, karena ini merupakan masalah lintas sektoral, maka berbagai sektor harus bekerja sama untuk menyelesaiannya.

a. Keadaan Stunting di Indonesia

Stunting permasalahan malnutrisi yang disebabkan oleh berbagai faktor dan terjadi di setiap generasinya. Orang-orang di Indonesia sering percaya bahwa tubuh pendek atau tinggi diwariskan. Sikap yang salah dalam masyarakat membutuhkan intervensi segera dari masyarakat, pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Terbukti bahwasannya keturunan hanya ikut andil sebanyak 15% dalam memberikan kontribusi. Sedangkan pola makan, hormon pertumbuhan, dan adanya penyakit infeksi berulang merupakan unsur yang dapat memberikan pengaruh terbesar. Merokok dan polusi udara adalah dua faktor lagi yang berkontribusi pada perkembangan terhambat.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus stunting terbesar dan terbanyak di dunia. Hal tersebut tercatat pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat dua ASEAN dan lima dunia untuk kasus stunting terbanyak. Tercatat pada tahun itu Indonesia menanggu kasus stunting sebesar 30,8% di atas batas bawah rata-rata persentase yang telah diberikan oleh WHO. Berbagai macam determinan yang mempengaruhi tingginya stunting di Indonesia ini, seperti ASI inklusif, posisi sosial ekonomi yang buruk, persalinan dini, persalinan pendek, pendidikan ibu yang tidak memadai, dan tinggal di dusun yang kotor. Stunting pada anak Indonesia ditentukan oleh variabel seperti lingkungan, sanitasi, dan budaya.

1) Pemberian ASI inklusif

Pemberian ASI eksklusif dikaitkan dengan risiko stunting yang lebih tinggi pada anak-anak. Akibatnya, anak yang tidak mendapat ASI eksklusif berisiko mengalami stunting. Menurut dua penelitian terbaru, bayi yang disapih sebelum usia enam bulan berisiko lebih tinggi mengalami stunting. Menyusui antara usia 0 dan 5 bulan akan membantu mengurangi stunting pada anak.

2) Status ekonomi dan sosial keluarga

Pendapatan keluarga merupakan salah satu variabel sosial ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga pertanian berisiko mengalami stunting. Stunting lebih mungkin terjadi pada orang berpenghasilan rendah, seperti ayah berpenghasilan rendah dan keluarga dengan status sosial ekonomi rendah.

3) Panjang bayi melahirkan

Bayi yang lahir dengan panjang kurang dari 48 cm berisiko mengalami stunting di kemudian hari. Bayi yang lahir dengan tinggi kecil di India terancam stunting.

4) Pendidikan ibu

Ibu memainkan pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi kesehatan anak-anak mereka; jadi, pendidikan yang lebih baik untuk ibu membuat mereka lebih diskriminatif dan imajinatif dalam menyediakan makanan sehat untuk anak-

anaknya. Menurut penelitian, wanita dengan pendidikan yang tidak memadai 1,6 kali lebih mungkin mengalami stunting.

5) Penyakit menular

Menurut WHO, penyakit seperti diare, cacingan, peradangan, malaria, dan masalah pernapasan sering menyerang anak-anak yang mengalami stunting. Karena anak-anak mungkin tidak menerima vaksinasi lengkap, diare adalah bahaya yang paling sering diamati. Menurut temuan penelitian di kota dan desa tertinggal, gangguan infeksi seperti diare membuat anak berisiko mengalami stunting. Sebuah penelitian di Ethiopia menemukan bahwa anak-anak yang mengalami diare 6,3 kali lebih mungkin mengalami stunting.

b. Kerja Sama Penurunan Angka Stunting Indonesia-UNICEF

Country Program Action Plan (CPAP) 2021- 2025 merupakan kerja sama yang dijalin antara Indonesia dan UNICEF untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bagi anak Indonesia. Program ini mencakup bidang kesehatan (gizi, akses air bersih, dan sanitasi), Pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Program ini juga berfokus pada peningkatan partisipasi remaja dalam masyarakat, penyediaan fasilitas memprioritaskan perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas.

Kerja sama Indonesia dan Unicef dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah karena kesamaan nilai dan norma yang dimiliki oleh Indonesia dan Unicef. Dalam hal ini baik Indonesia dan Unicef sama ingin mencapai tujuan *Sustainable Development Goals*, dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB atau United Nations Sustainable Development Cooperation Framework SDCF 2021-2025 serta mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam hal ini Indonesia dan UNICEF sama-sama memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan stunting sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di dunia. Kemudian faktor internal politik Indonesia juga menjadi pendorong jadi adanya kerja sama ini. Indonesia peringkat stunting nomor lima di dunia. Kurangnya kesadaran pada masyarakat mengenai penyebab stunting menjadi masalahnya, sehingga edukasi pada masyarakat tentang penyebab stunting sangat diperlukan. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program dalam percepatan penurunan angka stunting, salah satunya adalah melakukan koordinasi di berbagai tingkatan pemerintah agar program yang ada tidak *overlapping*. Namun, realisasi hingga tahun 2018, penurunan yang terjadi masih jauh dari standar angka stunting yang ditentukan dunia. Kerja sama antar sektor dalam negeri yang dilakukan pemerintah belum efektif dalam menurunkan angka stunting, sehingga diperlukan evaluasi mengenai program-program tersebut dan menunjukkan pemerintah belum memiliki kekuatan yang mumpuni dalam bidang ini, sehingga kerja sama dengan pihak yang lebih ahli, misalnya UNICEF diperlukan.

Dokumen kerja sama program ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Bapak Tito Karnavian dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia pada 30 Desember 2020. Melalui dokumen tersebut, maka UNICEF secara resmi menyepakati akan memberikan bantuan dana sebesar 1,5 Miliar untuk membantu Indonesia mensejahterakan seluruh anak Indonesia. Namun, untuk pelaksanaannya sendiri, CPAP Indonesia dan UNICEF baru mulai dilaksanakan pada 28 Januari 2021. Sedangkan daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana dari program ini ada delapan provinsi yang meliputi, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Kerja sama CPAP yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF melibatkan beberapa aktor atau pihak yang terlibat didalamnya. Diantaranya adalah Bappenas yang berperan sebagai koordinator pelaksana, dan kementerian-kementerian lain yang turut serta dalam berbagai program dalam kerja sama ini, seperti “Kementerian Kesehatan”, “Kementerian Sosial”, “Kementerian Pendidikan”, “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, serta beberapa kementerian lain.

Kerja sama yang diimplementasikan antara Indonesia dan UNICEF dalam CPAP ini didasari oleh tujuh tujuan utama pemerintah Indonesia terkait kesejahteraan anak, yaitu: Pertama, mempercepat penurunan stunting bagi anak di bawah usia lima tahun menjadi 14 persen. Kedua, meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum bersih hingga dua kali lipat, menjadi 15 persen. Ketiga, mengurangi angka kematian bayi hingga sepertiga, dari 24 menjadi 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Keempat, mencapai hingga 90 persen anak berusia 12-23 bulan yang diimunisasi lengkap. Kelima, meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63 persen menjadi 72 persen dan mengadopsi inovasi untuk meningkatkan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling terpinggirkan. Keenam, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, sosial atau penegakan hukum anak perempuan dan laki-laki yang pernah mengalami kekerasan dari 10 persen menjadi 20 persen. Ketujuh, mengurangi persentase anak yang hidup dalam kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan moneter nasional dari 11,8 persen menjadi 9 persen. Melalui kerja sama ini, Indonesia dan UNICEF berharap seluruh anak Indonesia dapat mengembangkan potensi mereka dengan baik.

Analisis Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bebas Stunting

Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dilaksanakan untuk mendukung penurunan stunting dan mendukung tujuan Indonesia bebas stunting, digunakan teori fungsi organisasi internasional yang dikembangkan oleh Harold K. Jacobson.

a. Fungsi Informatif

UNICEF memiliki peran penting dalam mendukung pendataan dan pengumpulan informasi terkait stunting di Indonesia. Tidak hanya sebagai pengguna data, UNICEF juga terlibat langsung dalam proses teknis pengumpulan dan penguatan sistem informasi gizi bersama pemerintah Indonesia. Keterlibatan ini menjadi bagian dari komitmen UNICEF untuk membantu percepatan penurunan angka stunting secara nasional.

Salah satu bentuk dukungan UNICEF adalah melalui kerja sama dalam pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). UNICEF memberikan bantuan teknis dalam penyusunan metodologi, pelatihan enumerator, serta validasi data yang diperoleh dari lapangan. Survei ini merupakan sumber utama data prevalensi stunting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan nasional. Selain itu, UNICEF juga mendukung pelaksanaan Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), sebuah survei global yang diadaptasi di Indonesia untuk mengukur indikator kesejahteraan anak, termasuk status gizi dan akses terhadap layanan dasar. Melalui MICS, UNICEF membantu menyediakan data yang komprehensif dan dapat dibandingkan secara internasional. UNICEF turut mendukung pengembangan dan penerapan sistem pelaporan elektronik seperti e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), yang digunakan di tingkat posyandu dan puskesmas. Melalui dukungan ini, UNICEF membantu memastikan bahwa data gizi anak dikumpulkan secara konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar intervensi gizi di tingkat lokal hingga nasional.

Dengan peran aktif ini, UNICEF menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem informasi gizi di Indonesia demi mendukung upaya pengurangan stunting secara berkelanjutan.

b. Fungsi Normatif

Pelaksanaan berbagai program kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan stunting mencerminkan dengan jelas fungsi normatif yang dijalankan oleh UNICEF. Fungsi normatif ini tampak dalam upaya UNICEF membentuk dan memperkenalkan standar, nilai, serta praktik baru yang secara bertahap menjadi acuan dalam kebijakan dan perilaku masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah pelaksanaan Proyek Penanggulangan Stunting Menggunakan Pipa LILA di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang memperkenalkan alat dan metode skrining status gizi balita yang lebih sederhana dan akurat. Inovasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendorong terbentuknya norma baru dalam praktik pelayanan kesehatan dasar di daerah. Hal serupa terlihat dalam pemberian 1.000 kotak *Ready to Use Therapeutic Food* (RUTF) kepada Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini bukan sekadar respons darurat, melainkan bagian dari upaya membangun standar penanganan gizi buruk akut yang cepat dan terstruktur, sesuai dengan praktik internasional yang dibawa oleh UNICEF ke dalam konteks lokal Indonesia.

Lebih lanjut, peluncuran Buku Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa UNICEF turut membentuk norma-norma komunikasi dalam kampanye kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan Tanoto Foundation dan Yayasan Jenewa Madani, pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi berbagai aktor lokal dalam membentuk narasi perubahan perilaku yang efektif—sebuah bentuk intervensi normatif dalam ranah komunikasi publik. Sementara itu, kelanjutan program penurunan stunting di delapan kabupaten di Aceh sejak 2019 mencerminkan konsistensi UNICEF dalam membangun praktik intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan pola tersebut sebagai standar penanganan stunting. Program Aksi Bergizi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat juga menggambarkan upaya UNICEF dalam membentuk norma hidup sehat di kalangan remaja, melalui edukasi rutin, konsumsi tablet tambah darah, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi sejak usia sekolah. Di Papua dan Papua Barat, pencanangan program perbaikan gizi anak bersama pemerintah daerah dan LSM setempat memperlihatkan fungsi normatif UNICEF dalam membangun jejaring kolaboratif lintas aktor serta menyebarluaskan praktik gizi ideal di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang tinggi.

Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa UNICEF tidak hanya terlibat sebagai mitra pelaksana program, tetapi juga sebagai aktor internasional yang menjalankan fungsi normatif melalui pembentukan standar, transformasi perilaku, dan penguatan institusi lokal dalam rangka mewujudkan penurunan stunting yang berkelanjutan di Indonesia.

c. Fungsi Pembuatan Peraturan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dalam kerja sama ini, UNICEF tidak menjalankan fungsi pembuatan peraturan. Adapun UNICEF lebih berfokus pada pemberian masukan dan saran kepada pemerintah Indonesia melalui kajian dan survei mengenai stunting yang dilakukan oleh UNICEF.

d. Fungsi Pengawasan

Selain menjalankan fungsi normatif, UNICEF juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan (*monitoring*) terhadap program penanggulangan stunting di Indonesia. Fungsi ini tampak melalui keterlibatan UNICEF dalam memantau, menilai, dan memberikan masukan

terhadap implementasi kebijakan serta kegiatan pemerintah. Dalam kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), UNICEF memperkuat sistem pemantauan di lapangan guna memastikan bahwa upaya penanganan stunting berjalan sesuai dengan strategi nasional dan menjangkau kelompok sasaran yang tepat. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan ini adalah penyusunan dan publikasi berbagai kajian dan laporan strategis. Di antaranya adalah *Formative Evaluation of the National Strategy to Accelerate Stunting Prevention*, yang secara khusus mengevaluasi efektivitas strategi nasional percepatan penurunan stunting. Kajian ini tidak hanya menggambarkan capaian dan tantangan yang dihadapi pemerintah, tetapi juga menyertakan analisis kritis dan rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan program di masa mendatang. Selain itu, laporan *Delivering Essential Nutrition Services through Community Action in Indonesia* menjadi contoh lain dari bagaimana UNICEF memantau jalannya program gizi di tingkat masyarakat. Melalui laporan tersebut, UNICEF menyoroti praktik baik dan hambatan yang terjadi di lapangan, sekaligus memberikan saran berbasis data agar intervensi dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa UNICEF tidak hanya menjadi mitra pelaksana, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat reflektif dan konstruktif. Dengan melakukan pemantauan secara sistematis dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk laporan kebijakan, UNICEF membantu memastikan bahwa upaya penurunan stunting di Indonesia berjalan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Fungsi ini memperkuat kapasitas pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan secara adaptif dan berbasis bukti, sesuai dengan prinsip tata kelola pembangunan yang efektif.

e. Fungsi Operasional

Dalam pelaksanaan fungsi operasionalnya di Indonesia, UNICEF secara nyata menyalurkan sumber daya berupa dana untuk mendukung program penanggulangan stunting. UNICEF mengalokasikan dana sebesar 150 juta dolar AS sebagai bagian dari komitmen internasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mempercepat penurunan angka stunting. Penyaluran dana ini menjadi wujud konkret kontribusi UNICEF dalam mendukung pelaksanaan program-program intervensi gizi dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Dengan menyediakan sumber daya finansial tersebut, UNICEF memastikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting dapat didukung secara optimal dari sisi pendanaan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional Harold K. Jacobson, kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas stunting telah menjalankan berbagai peran strategis. UNICEF tidak hanya berperan sebagai mitra pendukung teknis dan finansial, tetapi juga aktif dalam memperkuat sistem informasi gizi (fungsi informatif), membentuk standar dan norma baru dalam penanganan stunting (fungsi normatif), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program (fungsi pengawasan). Meskipun tidak terlibat langsung dalam fungsi pembuatan peraturan, UNICEF memberikan masukan berbasis bukti untuk mendorong kebijakan yang lebih efektif.

Dukungan operasional UNICEF, termasuk alokasi dana sebesar 150 juta dolar AS, memperkuat kapasitas pemerintah Indonesia dalam mempercepat penurunan stunting, khususnya di daerah dengan prevalensi tinggi. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pendekatan multisektoral—melibatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat—merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah stunting secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kerja sama Indonesia dan UNICEF telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya nasional menuju Indonesia bebas stunting. Ke depan, sinergi yang kuat, pemanfaatan

data berbasis bukti, serta komitmen berkelanjutan dari semua pihak akan menjadi faktor penentu dalam mencapai target penurunan stunting secara efektif dan inklusif.

KESIMPULAN

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui program Country Program Action Plan (CPAP) 2021–2025 merupakan bentuk kolaborasi strategis yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan anak, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting secara signifikan. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis fungsi organisasi internasional oleh Harold K. Jacobson, penelitian ini menemukan bahwa UNICEF menjalankan berbagai fungsi penting dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Pertama, fungsi informatif dijalankan UNICEF melalui dukungan terhadap pengumpulan data, pelaksanaan survei gizi nasional, serta penguatan sistem informasi gizi berbasis masyarakat. Kedua, fungsi normatif tercermin dalam upaya pembentukan standar baru melalui program-program edukasi gizi, intervensi berbasis komunitas, serta promosi pola hidup sehat. Ketiga, meskipun tidak menjalankan fungsi pembuatan peraturan secara langsung, UNICEF memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data kepada pemerintah Indonesia, yang berkontribusi pada penyusunan strategi nasional. Keempat, fungsi pengawasan dijalankan melalui penyusunan laporan evaluatif dan kajian yang membantu pemerintah dalam memantau capaian serta mengidentifikasi tantangan. Kelima, dalam fungsi operasional, UNICEF menyediakan dana sebesar US\$150 juta yang digunakan untuk membiayai berbagai program intervensi di delapan provinsi prioritas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama ini bersifat substansial, tidak hanya bersifat simbolik atau administratif. UNICEF tidak hanya berfungsi sebagai penyandang dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan penurunan stunting. Dengan sinergi antar aktor nasional dan internasional, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah, kerja sama ini menjadi model yang efektif dalam mengatasi tantangan kesehatan anak secara multisektoral. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesinambungan komitmen, pemanfaatan data berbasis bukti, serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan hingga tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, A., Harahap, J., & Ichwansyah, R. (2022). Situation Analysis as an Effort to Accelerate Stunting Reduction in Labuhan Batu Regency in 2022. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 2(2), 31–38. <https://doi.org/10.55885/jucep.v2i2.141>
- Archer, C. (n.d.). International Organizations, Third edition.
- Atasi Masalah Stunting di Tanah Papua, Dinkes dan UNICEF Berikan Pelatihan Tatakelola Program Gizi. (2022, October 12). Lintas Papua. Retrieved June 5, 2023, from <https://www.lintaspapua.com/lintas-jayapura/pr-6555158578/atasi-masalah-stunting-di-tanah-papua-dinkes-dan-unicef-berikan-pelatihan-tatakelola-program-gizi>
- Bryman, A. (n.d.). Social research methods.
- Budiaستutik, I., & Nugraheni, S. A. (2018). Determinants of Stunting in Indonesia: A Review Article. *International Journal Of Healthcare Research*, 1(1), 45-46.
- Dai, X., Snidal, D., & Sampson, M. (2010). International Cooperation Theory and International Institutions. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>
- de Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: A global perspective. In *Maternal and Child Nutrition* (Vol. 12, pp. 12–26). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>
- Demi Turunkan Stunting, Pemprov Sulawesi Selatan Luncurkan Buku Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani. (2023, February 9). UNICEF. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/demi-turunkan-stunting-pemprov-sulawesi-selatan-luncurkan-buku-pedoman-strategi>

- Fardianto, F. (2021, August 25). Rapat Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025. Bappeda Provinsi NTB. Retrieved June 5, 2023, from <https://bappeda.ntbprov.go.id/rakat-koordinasi-pusat-pelaksanaan-program-kerjasama-pemerintah-ri-unicef-periode-2021-2025/>
- Fitri, R., Huljannah, N., & Rochmah, T. N. (n.d.). Attribution-NonCommercial-ShareAlike license (CC BY-NC-SA 4.0). Program Pencegahan Stunting di Indonesia: A Systematic Review Stunting Prevention Program in Indonesia: A Systematic Review. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*. 2022, 17(3), 281–292. <https://doi.org/10.204736/mgi.v17i3.281-292>
- Government of Indonesia and UNICEF sign \$150 M Country Program Action Plan to deliver seven goals for the welfare of Indonesian children. (2020, December 30). UNICEF. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/government-indonesia-and-unicef-sign-150-m-country-program-action-plan-deliver-seven>
- HumbangHasundutankab.go.id - Indonesia Peringkat 5 di Dunia, Stunting Disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah. (2022, June 28). Humbang Hasundutan. Retrieved May 30, 2023, from <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828>
- Indonesia.go.id - Kementerian Kesehatan Fokus pada Pencegahan Stunting. (2019, November 27). Portal Informasi Indonesia. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/kementerian-kesehatan-fokus-pada-pencegahan-stunting>
- Iryani, R. Y., Maulidiah, S., Rahman, K., Prihatin, P. S., & Febrian, R. A. (2022). Capacity of community government in convergence stunting prevention in Sinaboi countries Sinaboi district, Rokan Hilir district. *International Journal of Health Sciences*, 619–638. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns4.5595>
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>
- Kinanti, A., & Yusran, R. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat.
- Kusfriyadi, M. K., & Sugiyanto, S. (2022). Risk factors of stunting in toddlers aged 24-59 months living in floating houses on the Kahayan River of Palangka Raya City : A case-control study. *GHMJ (Global Health Management Journal)*, 5(1), 81–87. <https://doi.org/10.35898/ghmj-51605>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.kemkes.go.id/folder/view/01/tugas-dan-fungsi.html>
- Mairo, Q. K. N., & Jenjawaty, S. (2022). Exploration of Stunting Events as an Effort to Prevent Stunting in Bangkalan Regency. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 1774–1778. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8025>
- Musa, R. K., Mashudi, I., & Lakoro, F. S. (n.d.). Stunting Program Strategy Effective in Bualo Village. <https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEBA>
- Nasution, B., Zainudin, Z., & Jaya, A. (2022). Prevention of Early Stunting Through Family Posyandu in Sape District, Bima Regency. *Empiricism Journal*, 3(2), 214–220. <https://doi.org/10.36312/ej.v3i2.1008>
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Purba, R. O., Siagian, A., & Aulia, D. (2020). The Analysis of Implementation of Specific and Sensitive Nutritional Intervention Programs in Reducing Stunting Toddler in Langkat District 2018. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2451–2457. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1220>
- Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia | Kementerian PPN. (2021, August 27). Bappenas. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg>
- Pemprov NTT dapat 1.000 boks RUTF dari UNICEF cegah masalah stunting. (2021, March 12). ANTARA News. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.antaranews.com/berita/2039610/pemprov-ntt-dapat-1000-boks-rutf-dari-unicef-cegah-masalah-stunting>
- Raharjeng, D., Kardina, S. H., Viantri, R. N., Fildzah, P., Putri, P. H., Syafiuddin, A., Amalia, R., & Widowati, K. (2023). The important role of multi-sector partnership in stunting management in east

- java: a literature review. *Bali Medical Journal* (Bali MedJ) 2023, 12(1), 660–664. <https://doi.org/10.15562/bmj.v12i1.4157>
- Siswati, T., Iskandar, S., Pramestuti, N., Raharjo, J., Rubaya, A. K., & Wiratama, B. S. (2022). Drivers of Stunting Reduction in Yogyakarta, Indonesia: A Case Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph192416497>
- Sugito. (2016). Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen Dalam Hubungan Internasional. <https://www.researchgate.net/publication/348740531>
- Sukoharjo Jadi Pilot Project Penanggulangan Stunting UNICEF Melalui Pita LiLA - Tribunjateng.com. (2022, July 26). Tribun Jateng. Retrieved May 30, 2023, from <https://jateng.tribunnews.com/2022/07/26/sukoharjo-jadi-pilot-project-penanggulangan-stunting-unicef-melalui-pita-lila>
- Sepakati CPAP 2021-2025 Senilai US\$ 150 Juta Indonesia-UNICEF Usung 7 Tujuan Kesejahteraan Anak Indonesia | Kementerian PPN. (2020, December 31). Bappenas. Retrieved May 30, 2023, from <https://bappenas.go.id/id/berita/sepakati-cpap-2021-2025-senilai-us-150-juta-indonesia-unicef-usung-7-tujuan-kesejahteraan-anak-indonesia>
- Speech from Debora Comini, UNICEF Indonesia Representative. (2021, January 28). UNICEF. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.unicef.org/indonesia/stories/speech-debora-comini-unicef-indonesia-representative>
- Thalha, O., Dan, A., Anufia, B., & Islam, E. (n.d.). Resume: Instrumen Pengumpulan Data.
- UNICEF. (2021). Lampiran Kompendium Praktik Baik demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk anak di Indonesia 2021. UNICEF, 2.
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (n.d.). Levels and trends in child malnutrition.
- Warsidi, A. (n.d.). ". " - Wiktionary. Retrieved June 5, 2023, from <https://kumparan.com/acehkini/stunting-di-aceh-tinggi-unicef-dorong-keberlanjutan-pengentasan-malnutrisi-anak-1x4ja7jjqcW/2>
- William, I. (n.d.). International Cooperation.
- Zaluchu, F. (2022). Engaging the local church to tackle stunting in Indonesia: a case study in Nias Island. In *Christian Journal for Global Health* (Vol. 9, Issue 2).